

PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN INDONESIA: INTEGRASI KEMITRAAN, DANA ABADI, DAN WAKAF

**Dwi Nopriyanto¹, Ratna Wati², Desi Iska Fadhilah³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴,
Masrur Yahya⁵**

Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman¹, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur²,
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat³, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman⁴, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman⁵
pos-el: dwinopriyanto@fk.unmul.ac.id¹, bdratnasmd@gmail.com², Dess41292@gmail.com³,
widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁴, masruryahyaalwi@fkip.unmul.ac.id⁵

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia meskipun alokasi 20% APBD telah diprioritaskan untuk Pendidikan, tantangan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal masih menjadi isu utama. Keterbatasan fiskal dan ketergantungan sumber publik menuntut strategi pembiayaan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses pencarian literatur dilakukan pada basis data Scopus, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan meliputi *“sustainable education financing,” “education funding models in Indonesia,”* dan *“waqf-based endowment funds.”* Artikel yang dipilih terbit antara 2015–2024, berbahasa Inggris, dan relevan dengan konteks pembiayaan pendidikan di Indonesia. Data dianalisis melalui teknik analisis dengan menekankan pada identitas model pembiayaan dominan, dan implikasi terhadap keberlanjutan. Selain pembiayaan publik, ditemukan tiga model utama pembiayaan berkelanjutan seperti Kemitraan Pemerintah-Swasta atau *Public-Private Partnership* (PPP), dana abadi (LPDP), dan pembiayaan wakaf yang efektif meningkatkan efisiensi fiskal, kemandirian lembaga, dan pemerataan akses pendidikan. Integrasi ketiga model pembiayaan pendidikan ini dapat memperkuat sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, transparansi, dan tata kelola agar strategi pembiayaan berkelanjutan mampu mendukung pencapaian SDG 4-Pendidikan berkualitas.

Kata kunci: inovasi keuangan pendidikan, model berkelanjutan, pembiayaan pendidikan, SDG 4

ABSTRACT

Education is a fundamental factor in sustainable development. In Indonesia, although 20% of the regional budget (APBD) has been prioritized for education, the challenges of fiscal effectiveness, efficiency, and sustainability remain major issues. Fiscal limitations and dependence on public sources demand innovative, adaptive, and collaborative financing strategies. This research uses a qualitative approach with a literature review method. The literature search process was conducted in the Scopus and Google Scholar databases. The keywords used include "sustainable education financing," "education funding models in Indonesia," and "waqf-based endowment funds." The selected articles were published between 2015 and 2024, in English, and relevant to the context of education financing in Indonesia. Data were analyzed using analytical techniques that emphasize the identity of the dominant financing model and its implications for sustainability. In addition to public financing, three main models of sustainable financing were found, namely Public-Private Partnerships (PPP), endowment funds (LPDP), and waqf financing, which effectively increase fiscal efficiency, institutional independence, and equitable access to education. The integration of these three education financing models can strengthen the national education system. The government needs to strengthen regulations, transparency, and governance so that sustainable financing strategies can support the achievement of SDG 4—Quality Education.

Keywords: educational finance innovation, sustainable models, education financing, SDG 4

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar mendasar dalam Pembangunan bangsa dan telah diamanatkan secara konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di negara berkembang, peran pendidikan menjadi semakin vital mengingat tingginya angka kemiskinan, ketimpangan akses, dan kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah dibandingkan negara maju (Hanushek & Woessmann, 2020). Dalam konteks Indonesia, keberhasilan dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan SDG 4, tentang pendidikan berkualitas, sangat bergantung pada keterbatasan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang memadai dan berkelanjutan (UNESCO, 2022). Rekomendasi global dari agenda pendidikan 2030 menyarankan agar belanja pendidikan nasional dialokasikan minimal 4-6% dari PDB nasional, atau 15-20% dari anggaran nasional (UNESCO, 2022). Selain kesediaan dana, pendanaan pendidikan yang efektif adalah faktor krusial yang secara langsung memengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia karena pemberian pembiayaan memberikan kemudahan dalam manajemen pendidikan (Aurijah & Tukiran, 2025).

Pemerintah Indonesia telah berupaya memenuhi amanat tersebut melalui alokasi 20% anggaran belanja negara untuk fungsi pendidikan, namun tantangan utama bergeser dari masalah kuantitas alokasi menjadi isu efisiensi dan efektivitas belanja. Data keuangan yang komprehensif diperlukan untuk memantau efisiensi belanja dan mempertanggungjawabkan alokasi sumber daya finansial secara menyeluruh, yang melibatkan berbagai kementerian

dan lembaga (UNESCO, 2022). Kondisi ini diperburuk oleh kapasitas fiskal yang terbatas, rendahnya tingkat penerimaan pajak, ketergantungan pada bantuan internasional, serta kerentanan ekonomi akibat fluktuasi global (Al-Samarrai et al., 2019).

Strategi berkelanjutan yang melibatkan pendidikan merupakan komponen penting dalam memitigasi kemiskinan (Purba et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus (DAK), yang merupakan salah satu mekanisme pendanaan pendidikan di daerah, memiliki koefisien tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini menjelaskan bahwa mekanisme alokasi dana yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pembangunan (Purba et al., 2023).

Isu pembiayaan berkelanjutan menjadi sangat penting, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, di mana tuntutan untuk mencapai standar global dan keberlanjutan kelembagaan meningkat pesat. Dalam konteks negara berkembang, sumber pendanaan publik sering kali dianggap tidak dapat diandalkan dan tidak berkelanjutan, yang menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan (Mgaiwa, 2018). Analisis global menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi di Asia Timur menghadapi tantangan serupa, di mana model pembiayaan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjamin tata kelola dan kualitas di tengah dinamika pasar (Hoang & Lin, 2025). Jika ketidakmampuan dalam pendanaan ini terus berlanjut, nasib kualitas pendidikan, yang merupakan motor penggerak ekonomi berbasis

pengetahuan akan terancam. Studi mendalam mengenai bagaimana institusi pendidikan tinggi di negara berkembang dapat mencapai pembangunan berkelanjutan melalui strategi pendanaan yang adaptif dan inovatif telah menjadi fokus perhatian akademis global (Tien et al., 2022).

Perlu melakukan eksplorasi terhadap pendekatan pembiayaan alternatif dan inovatif. Beberapa sumber literatur mengidentifikasi perlunya mengintegrasikan pendanaan inovatif, ekonomi berbasis pengetahuan, dan efisiensi alokasi sebagai strategi utama untuk mengatasi masalah kurangnya pendanaan pendidikan yang dihadapi (Shrestha, 2020). Pendekatan yang disebut keuangan inovasi tidak hanya berfokus pada pencarian sumber dana baru dan tambahan, tetapi menekankan perlunya membelanjakan dana yang ada secara lebih efisien dan efektif (Patrinos & Tanaka, 2024). Salah satu bentuk pendanaan inovatif adalah dengan pembiayaan campuran, yang menggunakan dana publik untuk memikat dan menarik modal swasta, dengan tujuan meminimalkan risiko investasi swasta dalam pembangunan berkelanjutan (Patrinos & Tanaka, 2024).

Pentingnya perumusan model pembiayaan berkelanjutan diakui masih terdapat kesenjangan antara analisis kebijakan yang ada dan kebutuhan akan kerangka kerja yang diimplementasikan di Indonesia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berfokus pada analisis komparatif model pembiayaan pendidikan berdasarkan perubahan kebijakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan kelemahan model dominan (Novelantika & Karim, 2025). Di Indonesia, penelitian tentang perencanaan pembiayaan

menunjukkan bahwa strategi pembiayaan berkelanjutan mempengaruhi peningkatan kualitas di lembaga pendidikan (Permana et al., 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan pembiayaan pendidikan (Montenegro de Lima et al., 2020).

Pergeseran fokus dari upaya mobilisasi sumber daya yang bersifat direncanakan menjadi kerangka pengelolaan modal swasta dan filantropi secara strategis, menggunakan dana publik sebagai stimulan (Patrinos & Tanaka, 2024). Model ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel, mengatasi kendala tidak cukupan dengan mengedepankan efisiensi alokasi dan penataan sumber dana multi pihak, seperti dana abadi (*endowment funds*) yang merupakan praktik terbaik (Zatonatska et al., 2019). Hal ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan menyediakan model implementasi dan kontribusi praktis berupa panduan untuk menciptakan strategi pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk untuk program pendidikan nonformal (Darmawan & Rugaiyah, 2024).

Berdasarkan latar belakang, celah penelitian, dan kebaruan yang telah diuraikan, penelitian ini menetapkan tujuan membahas berbagai model pembiayaan pendidikan yang dapat diterapkan, serta keberlanjutan jangka panjang dari model pembiayaan pendidikan untuk mendukung pendidikan berkelanjutan di Indonesia sebagai negara berkembang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah model pembiayaan pendidikan di Indonesia, baik dari segi kebijakan, implementasi, maupun dampak terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan

Artikel penelitian difokuskan pada model pembiayaan pendidikan di Indonesia, dengan cakupan: 1). Kebijakan Nasional (misalnya alokasi 20% APBN untuk pendidikan, dan dana abadi). 2). Model pembiayaan alternatif (Kemitraan Pemerintah-Swasta/*public-private partnership*, wakaf, dana masyarakat).

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data akademik, yaitu Scopus, dan Google Scholar. Kata kunci gabungan “*sustainable education financing*”, “*education funding models In Indonesia*”, “*public-private partnerships in education*”, “*Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing*” hasil yang relevan dari tahun 2015-2024.

Kriteria inklusi: 1). Artikel di terbitkan dalam jurnal internasional, dan jurnal nasional, 2). Membahas salah satu atau lebih model pembiayaan Pendidikan di Indonesia, 3). Artikel berbahasa Inggris (studi utama) dengan akses penuh. Kriteria eksklusi: 1). Tidak relevan dengan konteks pembiayaan Pendidikan, 2). Hanya berupa opini dasar atau konseptual yang jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil analisis berbagai model pembiayaan pendidikan di Indonesia dalam konteks sebagai negara berkembang, berdasarkan tinjauan literatur. Analisis ini mengidentifikasi model-model pembiayaan utama dalam pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan mengkaji bagaimana keberlanjutannya. Analisis literatur mengidentifikasi beberapa model pembiayaan pendidikan yang dominan di Indonesia. Model-model ini terlihat pada (Tabel 1).

Tabel 1. Analisa Literatur Model-Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Penulis & Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode	Hasil	Kesimpulan	Hambatan
(Untari, 2016)	<i>Public-Private Partnerships in Improving the Quality of Education for the Poor in Indonesia</i>	Kualitatif/Studi Kasus. Analisis data dilakukan dengan Analisis Domain dan Pencocokan Pola (Pattern Matching)	Program Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat	Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kualitas dan akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin, yang merupakan sumber daya manusia (SDM) maupun dana, untuk mengatasi masalah akses dan kualitas pendidikan.	Isu utama yang dihadapi adalah sumber daya yang tidak memadai, baik sumber daya manusia (SDM) maupun dana, untuk mengatasi masalah akses dan kualitas pendidikan.

Penulis & Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode	Hasil	Kesimpulan	Hambatan
(Saputra, 2018)	<i>Allocation of Education Budget in Indonesia</i>	Kajian pustaka dan Dokumentasi	Sistem alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pendanaan pendidikan diatur sesuai kebijakan yang mengatur sistem pendidikan nasional, serta alokasi 20% dana pendidikan yang diperoleh dari APBN dan APBD. Peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20% telah diproklamasikan setiap tahun sejak berlakunya UU Sisdiknas 2003, dengan target pencapaian pada tahun 2009.	Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan peradaban suatu bangsa dan merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.	
(Saputro et al., 2022)	<i>Governance Policy and Education Financing Strategy to Improve National Education Development</i>	Kajian Pustaka (Literature Review)	Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan adalah kebijakan <i>top-down</i> yang didasarkan pada kebutuhan lingkungan (<i>environmental needs</i>). Strategi pembiayaan yang digunakan adalah strategi penganggaran (<i>budgeting financing strategy</i>)	Kebijakan memainkan peran kunci dalam menentukan arah pengembangan pendidikan nasional. Diperlukan kebijakan yang tepat dan strategi pembiayaan yang sesuai untuk memastikan bahwa pengembangan pendidikan nasional dapat berjalan optimal dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia	Kebijakan <i>top-down</i> mengimplikasikan adanya tantangan dalam adaptasi dan implementasi di tingkat bawah atau kurangnya partisipasi dari tingkat daerah/lapangan
(Rachman, 2022)	<i>Scholarship for catching up? The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) scholarship program as</i>	Analisis Kebijakan (<i>Policy Analysis</i>)	Program beasiswa LPDP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pilar kebijakan pembangunan ekonomi. Program ini	Program LPDP adalah instrumen kebijakan strategis yang didesain untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kualitas modal manusia secara besar-besaran, sejalan dengan visi ekonomi	Tantangan utama yang diimplikasikan adalah kebutuhan Indonesia untuk "mengjar ketertinggalan" dari negara maju, yang membutuhkan investasi kapital

Penulis & Tahun Terbit	Judul Artikel	Metode	Hasil	Kesimpulan	Hambatan
	<i>a pillar of economic development policy</i>		juga menunjukkan tren di mana pembiayaan pendidikan tinggi dialihkan dari pinjaman menjadi dana abadi (<i>endowment fund</i>) untuk tujuan jangka panjang.	jangka panjang.	manusia yang besar dan tepat sasaran
(Rohmana, 2023)	<i>University Funding Through Waqf: Lesson from Indonesia and Selected Countries</i>	Kajian Pustaka (<i>Library Research</i>) dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif.	Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang penting bagi kegiatan pendidikan dan dapat membantu pemerintah mengurangi kewajiban finansialnya dalam mendidik masyarakat	Wakaf adalah mekanisme pendanaan yang efektif dan berkelanjutan untuk pendidikan tinggi. Pengembangannya di universitas dapat diintensifkan melalui pengelolaan dana yang efektif, legislasi yang kuat, tata kelola yang baik, upaya pemasaran, dan identifikasi model pengelolaan wakaf yang tepat untuk diimplementasikan.	Keberhasilan universitas berbasis wakaf sangat bergantung pada pengelolaan dana yang efektif, legislasi yang kuat, dan tata kelola yang baik. Implikasinya, kelemahan dalam aspek-aspek tersebut akan menjadi hambatan
(Ekawaty et al., 2025)	<i>Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model to Enhance University Education Quality in Indonesia</i>	Kajian Pustaka (<i>Literature Review</i>)	Dana abadi berbasis wakaf (<i>Waqf-Based Endowment Funds</i>) adalah solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah pendanaan ini. Model ini dapat membantu Perguruan Tinggi meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi lebih kompetitif secara global, dan mencapai stabilitas finansial jangka panjang.	<i>Waqf-Based Endowment Funds</i> menawarkan pendanaan yang berkelanjutan dan efektif bagi Perguruan Tinggi di Indonesia. Penerapan model ini sangat krusial untuk memastikan Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka dan tetap kompetitif di kancang global.	Tantangan pendanaan berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>) yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas dan daya saing global mereka

Pembahasan

Sektor pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam hal keberlanjutan pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan minimal

20% APBN untuk fungsi pendidikan, isu efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal masih menjadi perdebatan utama (Aurijah & Tukiran, 2025). Data dari UNESCO menunjukkan bahwa banyak

negara berkembang, termasuk Indonesia, belum mampu mengoptimalkan pembiayaan untuk mencapai SDG 4 Pendidikan Berkualitas (UNESCO, 2022).

Keterbatasan fiskal, ketergantungan pada anggaran publik, dan fluktuasi ekonomi global menyebabkan sumber pendanaan pemerintah menjadi tidak stabil. Sistem alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, Pendanaan pendidikan diatur sesuai kebijakan yang mengatur sistem pendidikan nasional (Saputra, 2018). Kebijakan memainkan peran kunci dalam menentukan arah pengembangan pendidikan nasional. Diperlukan kebijakan yang tepat dan strategi pembiayaan yang sesuai untuk memastikan bahwa pengembangan pendidikan nasional dapat berjalan optimal (Saputro et al., 2022). Karena itu, diperlukan model pembiayaan yang lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif agar sistem pendidikan dapat tumbuh berkelanjutan dan selaras dengan arah *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Model program pelatihan, beasiswa, dan digitalisasi Kemitraan Pemerintah-Swasta (KSP) atau *Public-Private Partnership* (PPP) menawarkan solusi strategis bagi pemerintah untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan operasional pendidikan. Berdasarkan temuan Sajida & Kusumasari, (2023), keberhasilan PPP di sektor pendidikan bergantung pada komunikasi efektif, kejelasan tujuan, transparansi, dan peran kuat dari kedua sektor. Di Indonesia, PPP dapat berperan tidak hanya dalam penyediaan gedung sekolah, tetapi juga dalam pembelajaran. Program KPS: Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi

masyarakat miskin (Untari, 2016). Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Praktik serupa dapat diadaptasi dalam konteks nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga donor pendidikan untuk menjamin akuntabilitas dan mutu. Tidak ada presentasi yang tetap terhadap alokasi dana kemitraan Pemerintah-Swasta untuk alokasi dana pendidikan, sebagai contoh berdasarkan peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 perusahaan BUMN mengalokasikan dana CSR minimal 4% dari laba bersih perusahaan, di antaranya untuk sektor pendidikan (Nugraha, 2025).

Pembiayaan kemitraan Pemerintah-Swasta yang terkelola baik berpotensi mendorong efisiensi belanja pendidikan, mengurangi beban fiskal negara, serta mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak di daerah tertinggal. Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kualitas dan akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin (Untari, 2016).

Model dana abadi pendidikan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi contoh konkret pengelolaan dana berkelanjutan untuk investasi sumber daya manusia. (Rachman, 2022) menegaskan bahwa LPDP tidak hanya berperan dalam pemberian beasiswa pascasarjana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing bangsa melalui pembangunan modal manusia. Sebagai dana abadi, LPDP memperoleh modal awal dari APBN namun beroperasi melalui hasil investasi jangka panjang, sehingga mampu

mendanai pendidikan tanpa membebani anggaran rutin. Alokasi spesifik untuk beasiswa LPDP dari anggaran pendidikan 20% di tahun 2025 tidak diuraikan secara presentasi, karena dana tersebut tersebar ke berbagai kementerian, yang akan dialokasikan untuk berbagai program termasuk beasiswa LPDP, dana abadi LPDP hingga tahun 2025 mencapai Rp.154,11 triliun (Ameliya, 2025).

Penguatan sistem dana abadi di Indonesia perlu diperluas ke tingkat daerah dan lembaga pendidikan swasta melalui regulasi yang mendorong transparansi investasi, akuntabilitas, agar dapat menopang keberlanjutan pendidikan. Program LPDP suatu program untuk menyediakan akses ke perguruan tinggi atau pascasarjana, terutama bagi mahasiswa dari negara berkembang (Campbell & Neff, 2020; Cosentino et al., 2019).

Selain sumber dana Kemitraan Pemerintah-Swasta atau *Public-Private Partnership* dan dana abadi pendidikan (LPDP), wakaf pendidikan (*Waqf-base financing*) memberikan pendekatan berbasis nilai-nilai sosial dan spiritual yang berpotensi untuk memperkuat kemandirian dari lembaga pendidikan. Aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif, di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, beasiswa pendidikan, dan investasi kegiatan di wilayah kampus (Harahap & Yus, 2022). Dana abadi berbasis wakaf (*Waqf-Based Endowment Funds*) adalah solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah pendanaan ini. Model ini dapat membantu Perguruan Tinggi meningkatkan kualitas pendidikan (Ekawaty et al., 2025).

Pendekatan model pembiayaan pendidikan di negara muslim sebagai contoh membentuk perusahaan wakaf

universitas, di mana hasil pengelolaan dana wakaf digunakan untuk kegiatan pendidikan dan riset. Dana wakaf merupakan pendekatan inovatif terhadap keuangan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi berbasis agama, yang salah satunya berdampak positif pada sektor pendidikan dengan menyediakan stabilitas pembelajaran dan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa (Elmahgop et al., 2025). Pembiayaan berbasis wakaf berdampak positif pada pengembangan pendidikan dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan sekunder dalam pengembangan pendidikan (Hasan et al., 2018). Sehingga bagi negara Indonesia model wakaf produktif dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan berkelanjutan di berbagai lembaga pendidikan. Dana wakaf Universitas yang dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, tergantung kebijakan masing-masing universitas dan sifatnya wakaf. Dana wakaf tidak bisa digunakan secara langsung, melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu dan hasilnya yang kemudian digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan. Keberhasilan universitas berbasis wakaf sangat bergantung pada pengelolaan dana yang efektif, legislasi yang kuat, dan tata kelola yang baik (Rohmana, 2023).

Keberlanjutan jangka panjang dalam model pembiayaan pendidikan di Indonesia menjadi suatu hal yang harus di cermati secara serius terutama pembiayaan yang berasal dari kapasitas fiskal yang terbatas, kerentanan dari ekonomi global, serta adanya masalah internal dalam mekanisme alokasi dana. Isu keberlanjutan menjadi sangat penting, terutama pada pembiayaan jenjang pendidikan tinggi, di mana sumber pembiayaan publik masih tidak dapat

diandalkan. Studi komparatif menunjukkan bahwa tren pendanaan publik untuk universitas mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan signifikan dalam tingkat persetujuan (Mgaiwa, 2018). Hal ini diperburuk oleh pemerintah tidak mampu secara efektif untuk mencairkan dana yang telah ditetapkan (Mgaiwa, 2018). Olaleye et al., (2024), menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi di negara berkembang dipengaruhi oleh adanya keterbatasan sumber daya, dan kapasitas kelembagaan yang lemah, dan kurangnya kolaborasi. Pembiayaan pendidikan tidak harus bergantung dengan besarnya dana, tetapi perlunya kapasitas manajerial dan tata kelola perguruan tinggi.

Keberlanjutan model pembiayaan pendidikan tinggi harus dipahami dengan melihat lima dimensi utama di antaranya, *sustainability competences, campus greening, co-creation and knowledge transfer, sustainability science, dan curriculum sustainability* (Montenegro de Lima et al., 2020). Perlunya pemahaman dan penerapan kebijakan serta strategi pembiayaan yang ada secara optimal (Saputro et al., 2022). Dengan demikian pendekatan model pembiayaan pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada alokasi dana, tetapi perlu adanya transformasi dari institusi dan pembelajaran yang menanamkan nilai keberlanjutan secara sistem. Perlu penguatan wajib bagi institusi pendidikan tinggi dalam mengembangkan strategi untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar subsidi negara (Mgaiwa, 2018).

Pemerintah perlu membuat kebijakan dan program yang tepat untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta demi peningkatan kualitas pendidikan seperti

KPS melalui program BSM dan CSR harus terus didorong sebagai model yang efektif untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu (Untari, 2016). Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam model pembiayaan wakaf di universitas harus ditingkatkan melalui manajemen dana yang efektif, legislasi (peraturan hukum) yang kuat, serta tata kelola yang baik (Rohmana, 2023). Sehingga dengan adanya kesinergisan antara pembiayaan pendidikan dengan melibatkan kemitraan swasta dan diperkuat dengan tata kelola dana wakaf yang baik di universitas, hal ini menjadi landasan dalam memperkuat sistem pembiayaan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dalam studi literatur ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan di Indonesia sangat perlu adanya strategi dalam pembiayaan yang bersifat inovatif, kolaboratif, dan multilateral. Integrasi model Kemitraan Pemerintah-Swasta atau, dana abadi, dan wakaf merupakan sebuah solusi strategis yang tidak hanya menjamin stabilitas fiskal pendidikan, tetapi juga mendorong efisiensi, kemandirian institusi, dan pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode studi literatur, sehingga belum memuat data empiris lapangan dan tidak sepenuhnya mempresentasikan variasi implementasi pendanaan di berbagai daerah. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan tata kelola pendanaan, mendorong perluasan dana abadi nasional maupun daerah, serta menciptakan insentif bagi

sektor swasta untuk terlibat dalam skema PPP dan CSR pendidikan. Sementara perguruan tinggi perlu meningkatkan pengembangan wakaf produktif dan strategi pendanaan alternatif berbasis manajemen profesional. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris yang menilai efektivitas model pendanaan secara langsung sehingga dapat memperkaya rekomendasi kebijakan terkait model pembiayaan pendidikan berkelanjutan di Indonesia

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Samarrai, S., Cerdan-Infantes, P., & Lehe, J. (2019). Mobilizing Resources for Education and Improving Spending Effectiveness: Establishing Realistic Benchmarks Based on past Trends. *World Bank Group Education Global Practice*, March. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8773>
- Ameliya, T. M. (2025). DPR Nilai Alokasi RP 13 T ke LPDP Tepat Demi Bangun SDM Bermutu. *Antara Jatim*.
- Aurijah, S. C., & Tukiran, M. (2025). Education Financing to Improve Quality of Education in Indonesia. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 05(01), 524–535. <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>
- Campbell, A. C., & Neff, E. (2020). A Systematic Review of International Higher Education Scholarships for Students From the Global South. *Review of Educational Research*, 90(6), 824–861. <https://doi.org/10.3102/0034654320947783>
- Cosentino, C., Fortson, J., Liuzzi, S., Harris, A., & Blair, R. (2019). Can scholarships provide equitable access to high-quality university education? Evidence from the Mastercard Foundation Scholars Program. *International Journal of Educational Development*, 71(June), 102089. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102089>
- Darmawan, R., & Rugaiyah, R. (2024). Education Financing Model Transformation to Build Education Accessibility Through Free School Fees at PKBM Golden. *Advances In Social Humanities Research*, 2(5), 755–767. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.242>
- Ekawaty, M., Rohman, G. D., & A'yun, A. (2025). Waqf-Based Endowment Funds as a Sustainable Financing Model for Enhancing University Education Quality in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(I), 45–61.
- Elmahgop, F., Alsulami, F., Mohammed, M. G. A., Abdel-Gadir, S., & Elhassan, T. (2025). The Socio-Economic Impacts of Waqf Investment Funds as a Model for Sustainable Financing in Saudi Arabia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/su17093805>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. In *The Economics of Education* (Second Edi, pp. 171–182). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8>
- Harahap, A., & Yus, Y. (2022). Exploration of The Use of Waqf Assets at Educational Institutions. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 5(2), 801–814. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v5i2.2112>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2018). The Role of Waqf in Educational Development - Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 001–007. <https://doi.org/10.31436/jif.v8i1.319>

- Hoang, A., & Lin, T. (2025). *Sustainable Financing of Higher Education in East Asia: Challenges and Solutions*. 0–14. <https://doi.org/10.20944/preprints2025.1467.v1>
- Mgaiwa, S. J. (2018). The Paradox of Financing Public Higher Education in Tanzania and the Fate of Quality Education: The Experience of Selected Universities. *SAGE Open*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/2158244018771729>
- Montenegro de Lima, C. R., Coelho Soares, T., Andrade de Lima, M., Oliveira Veras, M., & Andrade Guerra, J. B. S. O. de A. (2020). Sustainability funding in higher education: a literature-based review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 21(3), 441–464. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2019-0229>
- Novelantika, & Karim, H. A. (2025). Comparative Analysis of Education Financing Models in Indonesia Based on Policy Changes. *ICMIE Proceedings*, 2(1), 96–102. <https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.78>
- Nugraha, M. R. (2025). *Berapa Persen Dana CSR dari Perusahaan yang Wajib Dikeluarkan?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-persen-dana-csr-dari-perusahaan-yang-wajib-dikeluarkan-lt5f979e0658d4a/>
- Olaleye, S. A., Gbadegeshin, S. A., Balogun, O. S., Agbo, F. J., & Mogaji, E. (2024). Higher education management in developing countries: a bibliometric review. *Information Discovery and Delivery*, September 2024. <https://doi.org/10.1108/IDD-02-2024-0033>
- Patrinos, H., & Tanaka, N. (2024). Education: Innovative Financing in Developing Countries. *International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank*, 1. <https://doi.org/10.1596/41476>
- Permana, H., Wahyudin, U. R., Latifah, A., & Irwansyah, R. (2024). Sustainable financing planning in improving the quality of education at pesantren. *BIS Humanities and Social Science*, 1, V124005. <https://doi.org/10.31603/bishss.93>
- Purba, J. T., Budiono, S., Hariandja, E. S., & Pramono, R. (2023). Sustainability Strategy to Alleviate Poverty Through Education, Energy, GRDP, and Special Funds: Evidence from Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(5), 1397–1406. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.180510>
- Rachman, M. A. (2022). Scholarship for catching up? The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) scholarship program as a pillar of economic development policy. *International Journal of Educational Development*, 96, 0–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102701>
- Rohmana, Y. (2023). *University Funding Through Waqf: Lesson from Indonesia and Selected Countries* (Vol. 2). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_15
- Sajida, & Kusumasari, B. (2023). Critical success factors of Public-Private Partnerships in the education sector. *Public Administration and Policy*, 26(3), 309–320. <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2022-0127>
- Saputra, A. (2018). Allocation of Education Budget in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(2), 141–147. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.19>

- Saputro, A. D., Rachmandhani, M. S., & Laksana, S. D. (2022). *Governance Policy and Education Financing Strategy to Improve National Education Development*. 462–467. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_77
- Shrestha, M. (2020). Alternative Approaches of Financing Education: a Review. *BSSS Journal of Commerce*, July 2020. <https://doi.org/10.51767/joc1209>
- Tien, N. H., Ngoc, N. M., Trang, T. T. T., Duc, L. D. M., & Mai, N. P. (2022). Sustainable Development of Higher Education Institutions in Developing Countries: Comparative Analysis of Poland and Vietnam. *Contemporary Economics*, 16(2), 195–210. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.477>
- UNESCO. (2022). The Financing of Education in Indonesia. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, 0–10.
- Untari, S. (2016). Public-Private Partnerships in Improving the Quality of Education for the Poor in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 6(6), 65–72. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/31414>
- Zatonatska, T. H., Rozhko, O. D., Lyutyy, I. O., Tkachenko, N. V., & Anisimova, O. Y. (2019). Global Practices of Higher Education Financing: Approaches and Models. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 22(4), 95–112. <https://doi.org/10.5782/2223-2621.2019.22.4.95>